BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa yunani (sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen-elemen atau komponen-komponen yang di hubungkan bersama untuk mempermudah jalannya arus/alur data informasi, materi, maupun energy. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang saling berinteraksi.

Istilah sistem dalam bahasa yunani (sustema) yang artinya himbunan bagian atau unsur yang terkait secara teratur untuk mencapai tuyjuanya.

Sistem juga merupakan suatu bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta item item penggerak, contoh umum misalnya seperti Negara. Negara adalah suatu kesatuan yang mengandung beberapa unsur atau elemen seperti, kota, provinsi yang mejadikan suatu Negara.

Kata “system” sering kali di gunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan dalam banyak hal dan dalam banyak bidang pula. Dalam pengertian yang paling umum system adalah sesuatu yang berkaitan.

Syarat-syarat sistem

Sistem harus di bentuk untuk menyelesaikan masalah.

Elemen sistem aharus mempunyai rencana yang di terapkan.

Adanya hubungan antara elemen sistem.

Unsure dasar dari proses (arus informasi,energy, dan material) lebih penting dari elemen sistem.

Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen.

Secara garis besar sistem bias di bagi dua:

- Sistem fisik (Fisical System)

Kumpulan elemen-elemen/unsure-unsure yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapan di identifikasikan secara nyata tujuan-tujuannya.

Contoh:

Sistem transportasi. Elemen: petugas, mesin, organisasi yang menjalaninya.

Sistem computer. Elemen: peralatan yang bekerja sama untuk menjalankan pengolahan data.

- Sistem abstrak (abstract system)

Sistem yang di bentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat di identifikasikan secara nyata tetapi dapat di uraikan elemen-elemennya

Contoh:

Sistem teknologi, hubungan manusia dengan tuhannya.

Model sistem sederhana.



Gambar 2.1 model system sederhana

Contoh:

Program hitungan basic kita masukan, setelah kita jalankan kita dapat hasilnya.

Data mahasiswa (nama, nilai) diproses berupa laporan.

2.1.1 Elemen Sistem

Pada dasarnya setiap system memiliki empat dasar elemen:

Objek, yang dapat berupa bagian, elemen ataupun variable dan ia dapat berbentuk dalam benda fisik ataupun abstrak, bahkan bias keduanya sekaligus; tergantung kepada kedua sifatnya tersebut.

Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan system dan objeknya.

Hubungan internal, hubungan internal antara objek-objek di dalamnya.

Lingkungan, tempat dimana system tersebut berada.

Ada beberapa elemen yang membentuk system,yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan.

2.1.2. Karakteristik Sistem.

- Organisasi
- Interaksi
- Interdependensi
- Integrasi
- Tujuan pokok
- Organisasi.

Mencakup sturuktur dan fungsi organisasi

Struktur, tanpa adanya struktur organisasi maka akan sulit menjalankan sebuah organisasi dan akan mengacak-acak setiap bagian dalam organisasi tersebut.

Fungsi, organisasi tidak dapat berjalan tanpa adanya fungsi dari bagian maupun subbagian.

- Interaksi

Saling berhubungan antara suatu bagian dengan bagian yang lainya.

Contoh: Top manajer dengan mid manajer dan dengan para pekerja.

- Interdependensi.

Bagian yang mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainya.

Contoh: bagian marketing sangat bergantung pada bagian produksi dan keuangan. Dalam hal penagihan konsumen.

- Integritas.

Suatu keterpaduan antara subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan.

Contoh: Bagian marketing mendapat pesanan 100 unit mobil tetapi hanya dapat menyediakan 75 unit, untuk memecahkan masalah ini harus bekerjasama dengan perusahaan yang sama dalam bidangnya.

Tujuan pokok

Tujuan pokok (main objective) yaitu pemusatan tujuan dari masing-masing sub system.

2.2. Pengertian Sistem Informasi

Secara bahasa system informasi adalah pengetauhan yang di dapatkan dari pembelajaran, pengalaman atau instruksi, namun istilah ini mempunyai banyak arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan mental.

Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwa peristiwa tertentu atau situasi yang telah di kumpulkan atau dimulai melalui proses komunikasi, pengumpulan intelejen ataupun di dapatkan dari berita itu pun dapat dinamakan informasi. Informasi yang berupa koleksi data dan fakta sering kali di namai informasi statistika. Dalam bidang ilmu computer, sistem informasi adalah data yang disimpan, diproses dan di transmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang di dapat dari pembelajaran, pengalaman, atau instruki dan aliranya.

Sedangkan konsep dasar system informasi adalah data yang telah di proses dan memiliki arti bagi pengguna berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi ada proses transformasi data menjadi suatu informasi

- Data merupakan raw material untuk suatu informasi, misalnya representasi biner.

- Kuantitas informasi, satuan ukuran informasi, untuk representasi biner satuan ukuran informasinya adalah: bit, byte dst.

- Kualitas informasi, kualitas informasi tergantung kepada penerimanya, kualitas informasi yang baik memiliki beberapa criteria seperti: selalu update, disampaikan di tempat yang benar, memiliki sumber yang jelas, dan fakta yang bisa di jamin. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal yaitu:

Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias dan tidak menyesatkan, aukurat juga berarti informasi harus jelas dan mencerminkan maksudnya.

Tepat pada waktunya, artinya informasi harus disampaikan pada waktunya, informasi memiliki validasi yang tinggi, itu menentukan baik/tidaknya suatu informasi.

Relevan, berarti memiliki manfaat bagi penggunanya. Dan juga harus efektif dari segi penyampaian dan cost untuk informasi tersebut.

- Umur informasi, kapan atau sampai kapan informasi memiliki nilai bagi penggunanya. Ada yang namanya *condition information* yang mengacu pada titik waktu tertentu dan *operating information* yang menyatakan suatu perubahan pada range waktu tertentu.

2.3. Perancangan Sistem Informasi

Perancangan system informasi merupakan pengembangan system baru dari system lama, atau bahkan mengganti total system yang sudah ada dengan system yang baru. Di harapkan masalah-masalah yang ada di system yang lama dapat di pecahkan di system baru tersebut.

Secara konseptual pengembangan system informasi adalah sebagai berikut :

Analisi sistem : menganalisa dan mengidentifikasikan masalah kemudian mencari solusi yang terbaik untuk suatu sistem informasi.

Perancangan sistem : merancang input, output, struktur file, program, procedure serta hardware dan sofeware guna mendukung suatu sistem informasi.

Pembangunan dan testing sistem : membuat perangkat lunak (*software)* yang di perlukan untuk mendukung sistem dan melakukan testing secara akurat.

Melakukan instalasi perangkat keras (*hardware)* dan mengoprasikan prangkat lunak tersebut.

Implementasi sistem : Beralih dari sistem lama ke sistem yang baru, serta melakukan panduan dan pelatihan yang di perlukan.

Operasi dan perawatan : mendukung operasi system informasi dan melakukan perubahan dan penambahan atau adjustment fasilitas yang di perlukan.

Evaluasi sistem : mengevaluasi sistem yang baru di terapkan, menilai sampai sejauh mana perkembangan system yang di operasikan tersebut.

2.4. Alat bantu analisis

Flowmap

Flowmap adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah suatu urutan prosedur dari suatu program. Flowmap berguna untuk membantu analisis dan programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen yang lebih kecil, Dan menolong dalam analisis alternative pengobrasian

Diagram Konteks

Diagram konteks adalah sebuah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu system, diagram konteks adalah level tertinggi dari DFD *(Data Flow Diagram)* yang menggambarkan seluruh input ke system, ia akan memberi gambaran tentang keseluruhan system tersebut, system dibatasi oleh boundary (*dapat digambarkan dengan garis putus-putus*). Dalam diagram konteks \hanya ada satu proses, tidak boleh ada *store* dalam diagram konteks.

Data Flow Diagram

Data Flow Diagram adalah suatu data yang menggunakan notasi notsi yang menggambarkan arus dari data system, yang penggunaanya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, sturuktur yang jelas.

2.5. Pengertian Good Cooperate Governance

Tatakelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* selanjutnya disingkat dengan GCG adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabiltas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemilik Modal/RPB dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika. *Stakeholders* perusahaan antara lain pemilik, kreditor, pemasok, asosiasi usaha, karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat luas.

Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perum Perumnas ini merupakan wujud komitmen dan langkah proaktif manajemen untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik bagi perusahaan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya SK Menteri BUMN Nomor 117/MBU/2002 yang mewajibkan penerapan praktik *good corporate governance* sebagai landasan operasional pengelolaan BUMN. Sejalan pula dengan ditetapkannya Undangundang BUMN yang di dalamnya terkandung pengelolaan BUMN dengan berlandaskan praktik dan prinsip *good corporate governance*. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN (termasuk Perum) memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi disamping sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan. Untuk dapat mengoptimalkan peran tersebut dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya perusahaan dan profesionalisme melalui penerapa *good corporate governance* dalam sistem pengelolaan BUMN.

Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) adalah perusahaa yang sahamny dimiliki oleh negara. Pemilik mendelegasikan

kewenanga pengawasan kepada Dewan Pengawas sementara Direksi adalah orga perusahaan yang melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perum Perumnas serta mewakili Perum Perumnas, baik di dalam maupun di luar pengadilan *(personastandi injudicioo).*

2.6. Tujuan Good Cooperate Governance (GCG) di Perumnas

Tujuan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Perum Perumnas adalah:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja (*highperformance*) serta citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

   Code of Corporate Governance
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*.
4. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko perusahaan secara lebih efisien dan efektif.
5. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis perusahaan.
6. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

2.7. Prinsip Penerapan Good Cooperate Governance (GCG) pada Perumnas.

Perusahaan senantiasa berupaya melaksanakan kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan loyalitas Perusahaan terhadap kepentingan Pemilik Modal dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perusahaan. Perusahaan senantiasa mematuhi undang-undang dan peraturan terkait dan meningkatkan kepatuhan dan praktik yang baik dalam pengelolaan bisnis di lingkungan Perusahaan berada. Perusahaan mendukung inisiatif berkaitan dengan praktik *good corporate governance* di Indonesia antara lain panduan yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* dan menerapkannya sesuai dengan kondisi yang berlaku bagi Perusahaan. Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berlaku umum sebagai berikut :

1. Transparansi dan Pengungkapan Informasi

Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara, khususnya perusahaan umum. Pengungkapan Perusahaan atas transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi, rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan serta struktur kepemilikan perusahaan dan perubahanperubahan yang terjadi dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Pengungkapan tersebut tidak menghilangkan komitmen perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diatur oleh hukum dan perundangan

serta praktik terbaik dalam *good corporate governance*. Kerahasiaan informasi tersebut menyangkut perlindungan terhadap hak-hak individu, ***Code of Corporate Governance*** dan/atau hal yang menyangkut hasil penelitian dan pengembangan serta berbagai informasi lainnya yang akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, persaingan pasar, keamanan negara dan keamanan politik.

Perusahaan menerapkan sistem yang memungkinkan bagi Pemilik Modal untuk mengakses informasi dengan kesempatan yang sama, serta mendapatkan informasi secara cukup, tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan. Perusahaan juga akan mengungkapkan berbagai informasi relevan yang dibutuhkan publik

berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas operasional perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pelanggan, masyarakat dan lingkungan. Informasi tersebut dapat diakses secara memadai demi kepentingan masyarakat terkait.

Perusahaan akan memberikan penjelasan yang memadai kepada semua pihak atas kejadian atau masalah yang diakibatkan aktivitas perusahaan misalnya masalah lingkungan, kecelakaan, kekurangan produk dan jasa Perusahaan. Pengungkapan tersebut sebagai wujud komitmen Perusahaan guna mengurangi dampak yang lebih buruk bagi para pemangku kepentingan
dan lingkungan.

2. Kewajaran

Kewajaran dan kesetaraan adalah perlakuan perusahaan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan. Perusahaan menjamin bahwa setiap Pemilik Modal mendapatkan perlakuan yang wajar, setara, serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga akan senantiasa berlaku jujur dan adil di dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan politik.

3. Akuntabilitas

Perusahaan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ perusahaan menyadari tanggungjawab, wewenang, hak serta kewajiban.

Perusahaan meyakini bahwa penerapan akuntabilitas akan menjamin adanya (tapi tidak terbatas) pada pemberdayaan Dewan Pengawas, Perlindungan Hak Pemilik Modal dan tanggung jawab serta kewenangan yang jelas dalam jajaran Direksi. Akuntabilitas Perusahaan juga didasarkan kepada kewajiban individu atau organ Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki ***Code of***

Corporate Governance dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh perusahaan kepadanya. Kewajiban ini meliputi:

(a) memberikan penjelasan atau justifikasi atas pelaksanaan wewenang atau pelaksanaan tugas,

(b) pelaporan hasil atas pelaksanaan wewenang atau tugas tersebut, dan

(c) pertangungjawaban atas setiap beban atau kewajiban yang berasal dari aktivitas tersebut.

Dalam kaitan dengan pihak yang berkepentingan, penerapan akuntabilitasn perusahaan dalam aktivitas bisnis yang baik, memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya setempat serta dalam kerangka *good corporate governance*.

4. Kemandirian

Perusahaan meyakini bahwa independensi diperlukan dalam membuat keputusan terbaik bagi perusahaan. Keputusan terbaik hanya dapat dihasilkan jika perusahaan dan pengambil keputusan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme perusahaan.

Independensi akan diwujudkan dalam aktivitas bisnis yang sejalan denganetika bisnis yang berlaku umum serta dalam kerangka *good corporate governance.*

Kemandirian juga berarti pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Kemandirian diterapkan dengan cara menghormati peran dan fungsi organ perusahaan dan kejelasan mekanisme untuk mencegah benturan kepentingan sehingga dapat dengan mandiri, objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaann terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Perusahaan berupaya untuk melaksanakan

kegiatan perusahaan secara profesional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
Pertanggungjawaban diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan berupaya meningkatkan standar kerja dengan etika yang tinggi dengan paradigma yang ingin dicapai yaitu menjadi warga perusahaan yang baik (*good corporate citizen*).

2.8. Ruang Lingkup Good Cooperate Governance (GCG)

Pedoman GCG ini merupakan kristalisasi dari praktik-praktik terbaik *(best practices)* GCG, peraturan perundangan yang berlaku, keputusan menteri, kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang sehat yang telah dijalankan.

Pedoman GCG berisi struktur, proses dan praktik *governance* yang diarahkan untuk menjadi payung bagi pengembangan kebijakan perusahaan guna mencapai tata kelola perusahaan yang lebih baik. Seperti sifat bisnis maka pedoman ini juga bersifat dinamis yang senantiasa perlu disesuaikan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan praktik yang terbaik dunia usaha. Pedoman GCG ini akan menjadi salah satu acuan kerja bagi organ perusahaan dalam tata kelola dan kebijakan perusahaan di lingkungannya, sehingga dapat mengoptimalkan penerapan *good corporate governance* yang pada gilirannya mampu meningkatkan kinerja dan kemakmuran perusahaan.
Pedoman ini mengatur struktur dan proses Perusahaan yang meliputi :

1. Pemilik Modal Perum Perumnas.
2. Dewan Pengawas Perum Perumnas.
3. Direksi Perum Perumnas.
4. Jajaran pejabat manajemen di lingkungan Perum Perumnas.
5. Perum Perumnas sebagai Pemilik Modal di Unit-Unit Usaha/anak perusahaan Perum Perumnas, ataupun orang yang ditunjuk oleh Direksi Perum Perumnas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Unit-Unit Usaha Perum Perumnas.